

POLICY BRIEF

Peran Penting Perangkat Desa dan BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Kabupaten Garut

Ditulis Oleh :
Guruh Muamar Khadafi, S.IP.,M.M
Henri Prianto Sinurat, S.IP
Widyawan Pranawa, S.IP

EXECUTIVE SUMMARY

Kabupaten Garut, Jawa Barat, memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang melimpah namun masih dihadapkan pada masalah kemiskinan yang signifikan. Tingkat kemiskinan yang tinggi, keterbatasan akses ke sumber daya ekonomi, dan infrastruktur internet yang kurang memadai, merupakan tantangan utama yang dihadapi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) muncul sebagai solusi yang potensial, tetapi masih terdapat kendala dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan keterlibatan masyarakat dalam BUMDES.

Policy Brief ini menganalisis status, sebaran, dan perkembangan BUMDES di Kabupaten Garut, serta merekomendasikan strategi kebijakan dan implementasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Penguatan kapasitas BUMDES, pemberian dukungan finansial, pengembangan program pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan peran perangkat desa menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal dan mengurangi tingkat kemiskinan. Strategi implementasi termasuk penyelenggaraan pelatihan dan workshop, pendampingan langsung, pemberian modal awal, program bantuan teknis, pengembangan rencana aksi strategis, promosi dan edukasi, serta pelibatan aktif perangkat desa dalam mendukung kegiatan BUMDES.

LATAR BELAKANG



Kabupaten Garut, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan manusia namun masih dihadapkan pada masalah kemiskinan yang signifikan. Meskipun memiliki potensi yang melimpah, seperti lahan pertanian yang luas dan keberagaman budaya, tingkat kemiskinan di Garut tetap tinggi. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Garut berada di bawah garis kemiskinan, dengan indeks kemiskinan yang menempatkan wilayah ini di peringkat 9 dari 10 besar daerah termiskin di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi yang memadai, seperti lahan pertanian, modal usaha, dan peluang pekerjaan, juga menjadi kendala utama dalam upaya mengurangi kemiskinan di wilayah ini.

Di tengah tantangan ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) muncul sebagai solusi potensial untuk meningkatkan ekonomi lokal dan mengurangi tingkat kemiskinan. Meskipun terdapat banyak BUMDES di Garut, masih terdapat kendala dalam pemberdayaan ekonomi lokal dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam BUMDES yang perlu diatasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang masalah kemiskinan serta potensi BUMDES dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sangat penting untuk merancang strategi kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Garut.

ANALISIS KENDALA EKONOMI DAN SOSIAL

Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, menghadapi tantangan serius dalam mengatasi tingkat kemiskinan yang tinggi. Meskipun kaya akan sumber daya alam dan manusia, akses terhadap ekonomi lokal terbatas, sementara infrastruktur internet juga kurang. Kurangnya pemberdayaan ekonomi lokal dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam BUMDES menambah kompleksitas masalah. Inisiatif strategis dan kolaborasi diperlukan untuk meningkatkan akses dan pemberdayaan ekonomi lokal, serta meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam solusi-solusi ekonomi berbasis desa. Adapun untuk memahami secara lebih mendalam, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor yang saling terkait, di antaranya adalah :

1. Tingkat Kemiskinan yang Tinggi: Kabupaten Garut, Jawa Barat, terus dihantui oleh masalah kemiskinan yang signifikan. Data terkini menyoroti fakta bahwa tingkat kemiskinan di wilayah ini masih tinggi, dengan mayoritas penduduk hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan. Faktanya, Garut menempati peringkat ke-9 dari 10 daerah termiskin di Provinsi Jawa Barat, dengan indeks kemiskinan mencapai 9,77. Angka ini mencerminkan realitas yang mengkhawatirkan di mana banyak individu dan keluarga di Garut berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Tingginya tingkat kemiskinan ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan ekonomi individu, tetapi juga memengaruhi kemampuan masyarakat Garut untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, kemiskinan juga dapat memicu masalah sosial seperti pengangguran, ketidaksetaraan, dan ketidakstabilan ekonomi.

2. Keterbatasan Akses ke Sumber Daya Ekonomi: Banyak penduduk di Garut mengalami kesulitan dalam mengakses lahan pertanian yang memadai, modal usaha yang cukup, dan peluang pekerjaan yang layak. Meskipun menjadi wilayah terbesar ketiga di Provinsi Jawa Barat dengan luas mencapai 307,407 hektare, Garut masih menghadapi kesulitan dalam pemerataan pembangunan. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap distribusi sumber daya ekonomi agar lebih merata di seluruh wilayah Garut. Dengan demikian, langkah-langkah strategis perlu ditempuh untuk meningkatkan akses masyarakat Garut terhadap sumber daya ekonomi yang memadai, sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

3. Keterbatasan akses internet: Pada tahun 2023, Kabupaten Garut mengalami tantangan dalam

ANALISIS KENDALA EKONOMI DAN SOSIAL

akses internet dengan jumlah desa terbanyak yang belum terjangkau jaringan internet, mencapai 66 desa. Kabupaten ini menempati peringkat teratas dalam jumlah desa tanpa akses internet di Provinsi Jawa Barat, diikuti oleh Cianjur dengan 45 desa dan Kabupaten Sukabumi dengan 36 desa. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan digital yang signifikan di Garut, yang dapat menghambat perkembangan ekonomi dan akses informasi bagi masyarakat. Dalam era digital ini, upaya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua wilayah, termasuk desa-desa terpencil, dapat mengakses infrastruktur internet yang memadai untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial secara inklusif. [1].

4. Kurangnya Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Meskipun Kabupaten Garut kaya akan potensi sumber daya alam dan manusia, pemberdayaan ekonomi lokal masih belum optimal. Kurangnya inisiatif dan dukungan untuk pengembangan usaha lokal menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Keterbatasan ini mengakibatkan banyaknya peluang ekonomi lokal yang terlewatkan dan pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan upaya dalam memberikan dukungan, pelatihan, dan insentif bagi pengembangan usaha lokal di Garut. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mampu memanfaatkan potensi ekonomi lokal

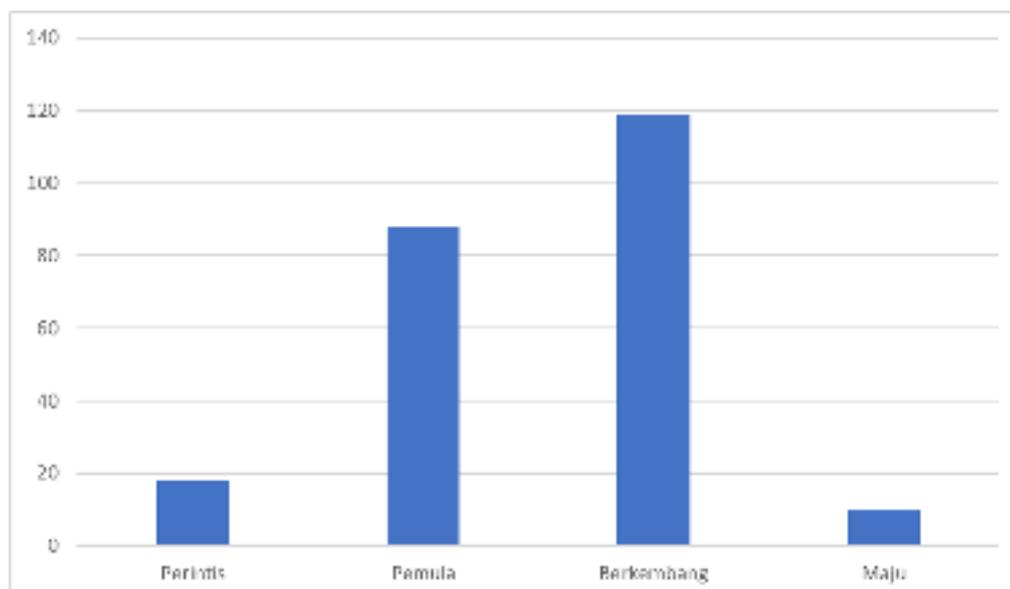
mereka secara optimal, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

5. Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam BUMDES: Meskipun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) hadir sebagai instrumen potensial untuk memajukan perekonomian desa, tingkat keterlibatan dan pemahaman masyarakat terhadap BUMDES masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan pemahaman tentang peran dan manfaat BUMDES serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat dapat menghambat potensi penuh BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Oleh karena itu, upaya edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan secara lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang BUMDES serta pentingnya peran mereka dalam mengelola dan mengembangkan usaha-usaha lokal melalui BUMDES. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi desa serta pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

ANALISIS STATUS, SEBARAN, DAN PERKEMBANGAN BUMDES DI KABUPATEN GARUT

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah menjadi media baru dalam pembangunan ekonomi lokal dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Garut telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam pendirian BUMDes. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah kabupaten Garut yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis desa.

Perkembangan jumlah BUMDes di Kabupaten Garut berkembang dengan pesat. Sehingga dibutuhkan analisis tentang status, sebaran, dan perkembangan BUMDes di wilayah Garut. Hal ini penting untuk mengevaluasi efektivitas BUMDes dalam memberdayakan masyarakat lokal, serta untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi desa.



Tabel 1 Jumlah BUMDes di Kabupaten Garut Berdasarkan Pemeringkatan
Sumber : DPMDes Kab. Garut

Di Kabupaten Garut terdapat 421 BUMDes yang telah mempunyai Badan Hukum. Diantara BUMDes tersebut terdapat 235 BUMDes yang aktif beroperasi, sedangkan 186 BUMDes tidak berjalan. Dari 235 BUMDes yang berjalan, terdapat 18 BUMDes dengan status Perintis, 88 BUMDes dengan status Pemula, 119 BUMDes dengan status Berkembang, dan 10 BUMDes dengan status Maju.

BUMDes yang aktif bergerak di bidang pertanian, peternakan, perdagangan umum, jasa dan pelayanan umum, pariwisata, internet dan telekomunikasi. BUMDes yang aktif di Kabupaten Garut didominasi oleh perdagangan umum dan pelayanan umum.

186 BUMDes yang tidak aktif maupun tidak berjalan tersebar pada 21 kecamatan di Kabupaten Garut. BUMDes di Kecamatan Samarang merupakan jumlah tertinggi yang tidak aktif maupun tidak berjalan, yaitu 20 BUMDes. BUMDes yang tidak aktif maupun tidak berjalan bergerak di bidang jasa dan layanan umum, perdagangan, pertanian, peternakan, wisata dan kuliner, pengelolaan infrastruktur, simpan pinjam, industri kecil. BUMDes yang tidak aktif maupun tidak berjalan di Kabupaten Garut didominasi oleh bidang jasa dan layanan umum, perdagangan.

Rekomendasi Kebijakan:

- 1. Penguatan Kapasitas BUMDES:** Pemerintah Kabupaten Garut perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada BUMDES dalam hal manajemen usaha, akuntabilitas keuangan, dan pengembangan strategi pemasaran untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan BUMDES.
- 2. Pemberian Dukungan Finansial:** Dukungan finansial dalam bentuk modal awal, bantuan teknis, dan insentif pajak perlu diberikan kepada BUMDES untuk mendorong pendirian dan pengembangan usaha lokal yang berkelanjutan.
- 3. Pengembangan Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal:** Pemerintah Kabupaten Garut harus merancang dan melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk pengembangan pertanian berkelanjutan, industri kreatif, dan pariwisata desa.
- 4. Penguatan Peran Perangkat Desa:** Perangkat desa perlu dilibatkan secara aktif dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan BUMDES serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan potensi BUMDES sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal.

STRATEGI IMPLEMENTASI

1. Penguatan Kapasitas BUMDES:

- **Penyelenggaraan Pelatihan dan Workshop:** Pemerintah Kabupaten Garut dapat menyelenggarakan serangkaian pelatihan dan workshop rutin untuk anggota BUMDES. Pelatihan tersebut dapat mencakup manajemen usaha, akuntabilitas keuangan, pengembangan strategi pemasaran, serta keterampilan manajerial lainnya.
- **Pendampingan Langsung:** Memberikan pendampingan langsung kepada BUMDES oleh tenaga ahli atau konsultan bisnis untuk membantu dalam peningkatan kinerja dan keberlanjutan operasional mereka.
- **Pembentukan Jaringan Kolaboratif:** Mendorong pembentukan jaringan kolaboratif antara BUMDES untuk saling berbagi pengalaman, sumber daya, dan praktik terbaik dalam mengelola usaha mereka.

STRATEGI IMPLEMENTASI

2. Pemberian Dukungan Finansial:

- Penyediaan Modal Awal: Pemerintah dapat memberikan bantuan modal awal kepada BUMDES dalam bentuk hibah atau pinjaman lunak untuk memfasilitasi pendirian dan pengembangan usaha lokal.
- Program Bantuan Teknis: Menggelar program bantuan teknis reguler yang mencakup konsultasi bisnis, pelatihan keuangan, dan bimbingan teknis lainnya untuk membantu BUMDES dalam mengelola keuangannya dengan baik.
- Insentif Pajak: Membuat kebijakan insentif pajak yang menguntungkan bagi BUMDES, seperti pengurangan pajak atau pembebasan pajak untuk usaha yang didirikan oleh BUMDES.

3. Pengembangan Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal:

- Penyusunan Rencana Aksi Strategis: Melakukan penyusunan rencana aksi strategis yang berbasis data untuk pengembangan sektor pertanian berkelanjutan, industri kreatif, dan pariwisata desa. Rencana ini harus melibatkan stakeholder terkait dan memperhatikan potensi lokal yang ada.
- Pengadaan Sumber Daya dan Infrastruktur: Memfasilitasi pengadaan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal, seperti fasilitas pertanian, pusat kreatif, dan infrastruktur pariwisata.
- Program Promosi dan Edukasi: Menggelar program promosi dan edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi ekonomi lokal dan manfaat dari pengembangan sektor-sektor tersebut.

4. Penguatan Peran Perangkat Desa:

- Pelatihan dan Pelibatan Perangkat Desa: Mengadakan pelatihan dan pelibatan perangkat desa dalam pengelolaan dan fasilitasi kegiatan BUMDES, termasuk pemahaman tentang peraturan dan prosedur yang terkait.
- Penyuluhan dan Kampanye Publik: Menggelar penyuluhan dan kampanye publik yang berfokus pada meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan potensi BUMDES sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal.
- Membentuk Tim Koordinasi: Membentuk tim koordinasi antara perangkat desa, BUMDES, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan komunikasi dan kerjasama yang efektif dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Daftar Pustaka

- Daftar Badan Hukum Desa dan Badan Usaha Desa, DPMDes Kab Garut. 2024
<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7092754/355-des-a-di-jabar-masih-blankspot-internet-terbanyak-di-garut>.
<https://jabar.antarane.ws.com/berita/433266/bumdes-di-garut-diminta-urus-badan-hukum-agar-usaha-lebih-berkembang?page=all>
<https://www.garutkab.go.id/news/bumdes-harus-mempunyai-peran-center-ekonomi>
Fienaurisilmi dan Maritza. Efektivitas BUMDes dalam Pengembangan Ekonomi Desa di Kabupaten Garut . LAN Commentaries. 2023

POLICY BRIEF

*Peran Penting Perangkat Desa dan BUMDes dalam Pemberdayaan
Ekonomi Lokal di Kabupaten Garut*



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PUSLATBANG PKASN

Jalan Kiara Payung KM 4,7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat



Untuk informasi lebih lanjut :

0857-2353-2423



www.bandung.lan.go.id



[puslatbangpkasn_lan](https://www.instagram.com/puslatbangpkasn_lan)



[puslatbang PKASN LAN](https://www.facebook.com/puslatbangpkasn.lan)